

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pendekatan Pragmatik

Pragmatik merupakan kajian terhadap makna penutur yang disesuaikan dengan konteksnya sehingga memungkinkan untuk lebih mengetahui hal yang dikomunikasikan daripada yang dikatakan. Pemahaman makna dalam perspektif pragmatik dipengaruhi oleh ekspresi jarak relatif yang menyebabkan penutur mempertimbangkan apa yang dikatakan dan tidak dikatakan. Pengkajian bahasa secara pragmatik dapat memberikan keuntungan, yaitu dapat membicarakan makna yang dimaksudkan oleh orang-orang, asumsi-asumsi mereka, maksud atau tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan yang mereka ajukan ketika bertutur.

Menurut Charles Moris (1983) dalam Djajasudarma (2012: 71) Pragmatik adalah *language in use*, studi terhadap makna ujaran dalam situasi tertentu. Sifat-sifat bahasa dapat dimengerti melalui pragmatik, yakni bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi. Pragmatik merupakan kajian tentang tata cara bagaimana para penutur dan petutur dapat memakai dan memahami tuturan sesuai dengan konteks situasi yang tepat (Mulyana, 2005: 78).

Levinson (1980) dalam Tarigan (2009: 31) menyatakan bahwa pragmatik adalah telaah mengenai relasi antara bahasa dan konteks yang merupakan dasar bagi suatu catatan atau laporan pemahaman bahasa, dengan kata lain telaah mengenai

kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta penyesuaian kalimat-kalimat dan konteks-konteks secara tepat.

Menurut Wijana (2009: 4) pragmatik mempelajari makna secara eksternal. Kata “bagus” secara internal bermakna “baik dan tidak buruk”, dan kata “presiden” secara internal bermakna “kepala negara”. Namun secara eksternal kata “bagus” bisa bermakna sebaliknya, seperti terlihat pada dialog berikut ini!

- (1) Ayah : Bagaimana ujian bahasa Indonesiamu?
 Anton : Wah, hanya dapat 45, Pak.
 Ayah : Bagus, besok jangan belajar. Nonton terus saja.
- (2) Awas presidennya datang!

Kata “bagus” pada kalimat (1) tidak bermakna “baik” atau “tidak buruk”, tetapi sebaliknya. Sementara itu, kalimat (2) digunakan untuk menyindir, kata “presiden” dalam kalimat (2) tidak bermakna “kepala negara”, tetapi bermakna seseorang secara ironis pantas mendapatkan sebutan itu.

Dari beberapa pendapat tentang pragmatik di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah tata cara bagaimana para penutur dan petutur berkomunikasi sesuai dengan konteks tuturannya yang tepat.

Teori mengenai pragmatik ini dibahas oleh peneliti karena terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai representasi kekuasaan tindak tutur. Pragmatik mempunyai hubungan yang erat dengan tindak tutur (*speech act*), karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik (Van Dijk, 1977:167; Firth, 1935) dalam Djajasudarma (2012: 71).

2.2 Pengertian Representasi

Stuart Hall (1997) dalam <http://sinaukomunikasi-wordpress.com> menyatakan bahwa proses produksi dan pertukaran makna antara manusia atau antarbudaya yang menggunakan gambar, simbol dan bahasa adalah disebut representasi. Media paling sering digunakan dalam produksi dan pertukaran makna adalah bahasa melalui pengalaman-pengalaman yang ada dalam masyarakat. Representasi merupakan media penyampaian pesan, berekspresi dan mengkomunikasikan ide, konsep atau perasaan kita, yang kesemuanya merupakan transmisi penyampai makna.

Unsur penting yang terdapat dalam proses formasi kelompok adalah representasi. Karena kelompok sosial tidak bisa ditetapkan sebelumnya, kelompok itu tidak ada disusun dalam pembelajaran. Kondisi semacam itu menyebabkan seseorang membicarakan atau bertindak atas nama kelompok. Representasi pada dasarnya berarti bahwa kita bisa direpresentasikan oleh wakil kita ketika secara fisik kita tidak ada (Jorgensen dan Philips, 2010: 86).

Istilah representasi mengacu pada bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan sebagaimana mestinya. Representasi penting dalam hal apakah seseorang, kelompok, atau gagasan tersebut ditampilkan sebagaimana mestinya dan bagaimana representasi tersebut ditampilkan (Badara, 2012: 56).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa representasi adalah bagaimana seseorang/kelompok memaknai, mewakili, mengomunikasikan, atau

menggambarkan sesuatu hal. Maksudnya adalah bagaimana cara seseorang dalam memaknai, mewakili, mengomunikasikan, atau menggambarkan sesuatu.

2.3 Hakikat Kekuasaan

Para pakar memiliki konsep yang berbeda-beda mengenai kekuasaan. Perbedaan sudut pandang akan menghasilkan penjelasan yang berbeda pula tentang kekuasaan. Fairclough dalam Jumadi (2005: 26) menyatakan kekuasaan sebagai kapasitas transformatif dan konsepsi rasional. Kapasitas transformatif adalah kapasitas agen-agen untuk memengaruhi jalannya peristiwa. Konsepsi rasional adalah kekuasaan atas pihak lain dan berkaitan dengan dominasi oleh para individu atau kolektif.

Robbins (2002: 182) menyatakan bahwa kekuasaan mengacu pada suatu kemampuan bahwa si A harus memengaruhi perilaku si B untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dilakukan oleh si B. Dalam definisi ini terimplikasi bahwa (1) suatu potensi yang tidak perlu diaktualisasikan agar menjadi efektif, (2) suatu hubungan yang saling ketergantungan, dan (3) bahwa si B mempunyai keleluasaan terhadap perilaku dirinya sendiri.

Weber dalam Jumadi (2005:26) menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kemungkinan pemaksaan seseorang atas perilaku orang lain. Sejalan dengan Weber, Bachrach dan Baratz menyatakan bahwa kekuasaan menentukan orang lain untuk menurut.

Dari beberapa pendapat tentang hakikat kekuasaan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan adalah perilaku seorang individu ketika ia memengaruhi,

mendominasi, memaksa aktivitas orang lain atau sebuah kelompok menuju suatu tujuan bersama.

2.4 Jenis-jenis Kekuasaan

Lee dalam Jumadi (2005: 27) membagi kekuasaan menjadi tiga jenis, yaitu (1) kekuasaan yang dibangun atas paksaan, (2) kekuasaan yang dibangun atas manfaat, dan (3) kekuasaan yang dibangun atas prinsip kehormatan. Jika digunakan kekuasaan paksaan, orang melakukannya bukan untuk memengaruhi orang lain, melainkan memaksa mereka agar menurut. Dalam hal ini kepatuhan dicapai lewat ancaman, paksaan fisik, atau apapun yang dilakukan untuk membangkitkan rasa takut pada pihak yang didominasi. Kekuasaan manfaat didasarkan pada asumsi pertukaran dan landasan keadilan. Keadilan artinya bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sama-sama transaksinya layak. Sementara itu, kekuasaan atas prinsip kehormatan didasarkan pada sikap menghargai, menghormati, bahkan mengasihi.

French dan Raven dalam Robbins (2002: 183) membagi kekuasaan menjadi lima jenis dasar atau sumber kekuasaan, yakni kekuasaan karena paksaan, kekuasaan penghargaan, kekuasaan jabatan, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan kharisma.

1. Kekuasaan Paksaan

Kekuasaan paksaan didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan rasa takut. Seseorang bereaksi terhadap kekuasaan jenis ini disebabkan rasa takut akibat negatif yang muncul apabila tidak mematuhi. Kekuasaan paksaan merupakan kekuasaan hukuman kepada orang lain yang dimaksudkan untuk memodifikasi pelaku agar menjadi perilaku yang bermanfaat.

2. Kekuasaan Penghargaan

Seseorang mematuhi keinginan atau perintah orang lain karena dengan berbuat begitu ia mendapatkan keuntungan positif. Oleh karena itu, apabila ada seseorang yang dapat memberikan suatu penghargaan yang menurut pandangannya merupakan sesuatu yang bernilai, maka orang tersebut akan memiliki kekuasaan atas dirinya, penghargaan tersebut dapat berbentuk apa saja yang menurutnya berharga. Jadi, kekuasaan penghargaan merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan penghargaan kepada orang lain (pengikutnya) karena kepatuhan mereka.

3. Kekuasaan Jabatan

Dalam suatu kelompok formal, mungkin akses yang paling sering bagi seseorang memperoleh kekuasaan adalah melalui jabatan. Kekuasaan jabatan adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi orang lain karena posisinya. Seseorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang kedudukannya lebih rendah. Dalam konteks ini adalah antara guru dan siswa, dimana guru memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sebagai atasan dan siswa sebagai pihak yang lebih rendah (bawahan).

4. Kekuasaan Keahlian

Kekuasaan keahlian adalah pengaruh yang dimiliki seseorang sebagai akibat dari adanya keahlian khusus atau pengetahuan yang dimiliki seseorang. Kekuasaan keahlian didasarkan pada persepsi atau keyakinan bahwa pemberi pengaruh mempunyai keahlian relevan atau pengetahuan khusus yang tidak dimiliki oleh orang yang dipengaruhi.

5. Kekuasaan Kharisma

Kekuasaan kharisma adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan (memiliki karisma dan menjadi panutan). Kekuasaan kharisma timbul karena adanya kekaguman pada orang lain dan keinginan untuk menjadi orang tersebut, baik sikap dan tingkah lakunya.

Dari beberapa pendapat tentang jenis-jenis kekuasaan di atas, peneliti mengacu pada teori kekuasaan French dan Raven yang menyatakan bahwa kekuasaan terbagi menjadi lima jenis dasar atau sumber kekuasaan, yakni kekuasaan karena paksaan, kekuasaan penghargaan, kekuasaan jabatan, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan kharisma.

2.5 Hakikat Tindak Tutur

Prinsip-prinsip pragmatik mengilustrasikan beberapa asumsi-asumsi yang diajukan ke dalam suatu percakapan. Namun, untuk tujuan apakah sebenarnya percakapan dilakukan? Beberapa hal tentang percakapan sebagai pertukaran informasi, penjagaan tali persahabatan sosial, kekerabatan dan sebagainya, negosiasi status dan peranan, pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindak bersama. Dengan demikian, percakapan dapat memenuhi fungsi yang berbeda-beda. Salah satu pendekatan analisa fungsi bahasa dalam percakapan adalah melalui teori tindak tutur.

Leech (1993: 19-20) menyatakan bahwa sebenarnya dalam tindak tutur mempertimbangkan lima aspek situasi tutur yang mencakup: penutur dan mitra tutur, konteks tuturan, tujuan tuturan, tindak tutur sebagai sebuah tindakan/aktivitas dan

tuturan sebagai produk tindak verbal.

Chaer (2010: 50) tindak tutur merupakan gejala individual yang bersifat psikologis dan keberlangsungan ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam tindak tutur lebih dilihat pada makna atau arti tindakan dalam tuturannya.

Selanjutnya Rohmadi (2004: 30) peristiwa tutur (speech event) merupakan gejala sosial dan terdapat interaksi antara penutur dalam situasi dan tempat tertentu, maka tindak tutur lebih cenderung sebagai gejala individual, bersifat psikologis dan ditentukan oleh kemampuan bahasa penutur dalam menghadapi situasi tertentu. Jika dalam peristiwa tutur orang menitikberatkan pada tujuan peristiwa, maka dalam tindak tutur lebih memperhatikan makna atau arti tindak dalam tuturan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tindak tutur merupakan suatu ujaran yang mengandung tindakan sebagai suatu fungsional dalam komunikasi yang mempertimbangkan aspek situasi tutur.

2.6 Jenis-jenis Tindak Tutur

Searle dalam bukunya *Act: An Essay in the Philosophy of Language* mengemukakan bahwa secara pragmatis ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur (Rohmadi 2004: 30) yakni tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak tutur perlokusi (*perlocutionary act*). Hal ini senada dengan pendapat Austin yang juga membagi jenis tindak tutur menjadi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Berikut pembahasannya.

1. Tindak Lokusi

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang dimaksudkan untuk menyatakan sesuatu; tindak mengucapkan sesuatu dengan kata dan makna kalimat sesuai dengan makna kata itu di dalam kamus dan makna kalimat itu menurut kaidah sintaksisnya. Fokus lokusi adalah makna tuturan yang diucapkan, bukan mempermasalahkan maksud atau fungsi tuturan itu. Rahardi (2003: 71) mendefinisikan bahwa lokusi adalah tindak bertutur dengan kata, frasa, dan kalimat sesuai dengan makna yang dikandung oleh kata, frasa, dan kalimat itu. Lokusi dapat dikatakan sebagai *the act of saying something*. Tindak lokusi merupakan tindakan yang paling mudah diidentifikasi karena dalam pengidentifikasiannya tidak memperhitungkan konteks tuturan (Rohmadi, 2004: 30).

Contoh tindak tutur lokusi adalah ketika seseorang berkata “badan saya lelah sekali”. Penutur tuturan ini tidak merujuk kepada maksud tertentu kepada mitra tutur. Tuturan ini bermakna bahwa si penutur sedang dalam keadaan lelah yang tersangat sangat, tanpa bermaksud meminta untuk diperhatikan dengan cara misalnya dipijit oleh si mitra tutur. Penutur hanya mengungkapkan keadaannya yang tengah dialami saat itu. Contoh lain misalnya kalimat “Sandy bermain gitar”. Kalimat ini dituturkan semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu apalagi untuk memengaruhi lawan tuturnya.

2. Tindak Ilokusi

Tindak ilokusi adalah tindak melakukan sesuatu dengan menyatakan sesuatu (Tarigan, 2009: 35) Ilokusi merupakan tindak tutur yang mengandung

maksud dan fungsi atau daya tuturan. Pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan tindak ilokusi adalah “untuk apa ujaran itu dilakukan” dan sudah bukan lagi dalam tataran “apa makna tuturan itu?”

Rohmadi (2004: 31) mengungkapkan bahwa tindak ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dan dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Contoh tindak tutur ilokusi adalah “udara panas”. Tuturan ini mengandung maksud bahwa si penutur meminta agar pintu atau jendela segera dibuka, atau meminta kepada mitra tutur untuk menghidupkan kipas angin. Jadi jelas bahwa tuturan itu mengandung maksud tertentu yang ditujukan kepada mitra tutur. Contoh lain, kalimat “Suseno sedang sakit”. Jika kalimat ini dituturkan kepada mitra tutur yang sedang menyalakan televisi dengan volume yang sangat tinggi, berarti tuturan ini tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan informasi, tetapi juga menyuruh agar mengecilkan volume atau bahkan mematikan televisi.

3. Tindak Tutur Perlokusi

Tuturan yang diucapkan penutur sering memiliki efek atau daya pengaruh (perlocutionary force). Efek yang dihasilkan dengan mengujarkan sesuatu itulah yang oleh Austin (1962) dinamakan perlokusi. Efek atau daya tuturan itu dapat ditimbulkan oleh penutur secara sengaja, dapat pula secara tidak sengaja. Tindak tutur yang pengujaran dimaksudkan untuk memengaruhi mitra tutur inilah merupakan tindak perlokusi.

Ada beberapa verba yang dapat menandai tindak perlokusi. Beberapa verba itu antara lain membujuk, menipu, mendorong, membuat jengkel, menakut-

nakuti, menyenangkan, mempermalukan, menarik perhatian, dan lain sebagainya (Leech, 2011: 322).

Contoh tuturan yang merupakan tindak perlokusi:

“ada hantu!”

“sikat saja!”

“dia selamat, Bu.”

Tiga kalimat tersebut masing-masing memiliki daya pengaruh yaitu menakut-nakuti, mendorong, dan melegakan .

Sehubungan dengan pengertian tindak tutur di atas, tindak tutur digolongkan menjadi lima jenis oleh Searle (Rohmadi, 2004:32; Leech, 1993: 164). Kelima jenis itu adalah tindak tutur representatif (asertif) , direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi. Berikut penjelasan kelimanya.

1. Representatif (Asertif)

Representatif merupakan tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya. Tindak tutur jenis ini juga disebut dengan tindak tutur asertif. Yang termasuk tindak tutur jenis ini adalah tuturan menyatakan, menuntut, mengakui, menunjukkan, melaporkan, memberikan kesaksian, menyebutkan, berspekulasi. Contoh jenis tuturan ini adalah: “Adik selalu unggul di kelasnya” . Tuturan tersebut termasuk tindak tutur representatif sebab berisi informasi yang penuturnya terikat oleh kebenaran isi tuturan tersebut. Penutur bertanggung jawab bahwa tuturan yang diucapkan itu memang fakta dan dapat dibuktikan di lapangan bahwa si adik rajin belajar dan selalu mendapatkan peringkat pertama di kelasnya.

2. Direktif

Tindak tutur direktif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar mitra tutur melakukan tindakan sesuai apa yang disebutkan di dalam tuturannya. Tindak tutur direktif disebut juga dengan tindak tutur impositif. Yang termasuk ke dalam tindak tutur jenis ini antara lain tuturan meminta, mengajak, memaksa, menyarankan, mendesak, menyuruh, menagih, memerintah, mendesak, memohon, menantang, memberi aba-aba. Contohnya adalah “Bantu aku memperbaiki tugas ini” . Contoh tersebut termasuk ke dalam tindak tutur jenis direktif sebab tuturan itu dituturkan dimaksudkan penuturnya agar melakukan tindakan yang sesuai yang disebutkan dalam tuturannya yakni membantu memperbaiki tugas. Indikator dari tuturan direktif adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh mitra tutur setelah mendengar tuturan tersebut.

3. Ekspresif

Tindak tutur ini disebut juga dengan tindak tutur evaluatif. Tindak tutur ekspresif adalah tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya agar tuturannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam tuturan itu, meliputi tuturan mengucapkan terima kasih, mengeluh, mengucapkan selsangat, menyanjung, memuji, meyalahkan, dan mengkritik. Tuturan “Sudah kerja keras mencari uang, tetap saja hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga”. Tuturan tersebut merupakan tindak tutur ekspresif mengeluh yang dapat diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang dituturkannya, yaitu usaha mencari uang yang hasilnya selalu tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Contoh tuturan lain adalah

“Pertanyaanmu bagus sekali” (memuji), “Gara-gara kecerobohan kamu, kelompok kita didiskualifikasi dari kompetisi ini” (menyalahkan), “Selamat ya, Bu, anak Anda perempuan” (mengucapkan selsangat).

4. Komisif

Tindak tutur komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya bersumpah, berjanji, mengancam, menyatakan kesanggupan. Contoh tindak tutur komisif kesanggupan adalah “Saya sanggup melaksanakan amanah ini dengan baik”. Tuturan itu mengikat penuturnya untuk melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Hal ini membawa konsekuensi bagi dirinya untuk memenuhi apa yang telah dituturkannya. Contoh tuturan yang lain adalah “Besok saya akan datang ke pameran lukisan Anda”, “Jika sore nanti hujan, aku tidak jadi berangkat ke Solo”.

5. Deklarasi

Tindak tutur deklarasi merupakan tindak tutur yang dimaksudkan penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru. Tindak tutur ini disebut juga dengan istilah isbati. Yang termasuk ke dalam jenis tuturan ini adalah tuturan dengan maksud mengesankan, memutuskan, membatalkan, mengabulkan, mengizinkan, menggolongkan, mengangkat, mengampuni, memaafkan. Tindak tutur deklarasi dapat dilihat dari contoh berikut ini.

- a. Ibu tidak jadi membelikan adik mainan. (membatalkan)
- b. Bapak memaafkan kesalahanmu. (memaafkan)
- c. Saya memutuskan untuk mengajar di SMA ini. (memutuskan).

Dalam penelitian ini, jenis tindak tutur yang dipakai adalah tindak tutur asertif, direktif, dan ekspresif.

2.7 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur

2.7.1 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif sangat potensial mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi tindak tutur ini menghendaki agar mitra tutur (selanjutnya disebut 'T') melakukan sesuatu sesuai dengan maksud tuturan Penutur (selanjutnya disebut 'P'). Dalam realisasinya, penggunaan tindak tutur ini mempresentasikan kekuasaan pemakainya.

2.7.1.1 Representasi Kekuasaan dalam Perintah

Sebagai salah satu jenis direktif, perintah (*requirements*) mempunyai karakteristik tertentu. Back dan Harnish dalam Jumadi (2005: 58) menyebutkan karakteristik perintah sebagai berikut. Di dalam menuturkan suatu tuturan tertentu, P memerintah T untuk melakukan sesuatu jika P mengekspresikan: (a) keyakinan bahwa tuturannya, di dalam otoritasnya terhadap T, merupakan alasan yang cukup bagi T untuk melakukan sesuatu; dan (b) maksud bahwa T melakukan sesuatu karena tuturan P.

Gejala itu juga terjadi ketika guru memberikan pengarahan tentang program pembelajaran, seperti pengarahan tentang materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa dalam satu semester, sistem evaluasi yang akan dilaksanakan, maupun buku paket dan LKS yang harus disiapkan siswa. Dengan kata lain, ketika memberikan pengarahan menyangkut hal-hal yang dianggap urgen, guru cenderung menggunakan perintah langsung yang mempresentasikan kekuasaan

dominatif. Namun dilihat dari konteks proses pembelajaran di kelas secara makro, gejala tersebut terkait dengan budaya dominatif yang masih banyak digunakan dalam sistem pembelajaran di sekolah kita. Dalam budaya pembelajaran yang dominatif, aturan-aturan sekolah, materi pembelajaran, sistem evaluasi, dan buku-buku pelajaran cenderung ditentukan oleh sekolah atau guru.

Secara keseluruhan, para peserta tutur dalam pembelajaran lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk perintah langsung. Penggunaan perintah langsung mempunyai kadar restriksi lebih tinggi daripada perintah tak langsung. Sifat dominatif kekuasaan itu semakin berkurang jika perintah itu menggunakan kata sapaan orang kedua Anda atau Saudara.

2.7.1.2 Representasi Kekuasaan dalam Permintaan

Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa juga menggunakan direktif dengan bentuk permintaan (*requestives*). Bila dibandingkan dengan perintah, permintaan mempunyai kadar restriksi lebih rendah sehingga kekuasaan yang direpresentasikan pun cenderung lebih humanis. Hal ini bisa dilihat dari langsung-tidaknya permintaan, modalitas yang dipilih, dan panjang tuturan yang membangun permintaan (Jumadi, 2005: 71)

Bach dan Harnish dalam Jumadi (2005: 71) memberikan karakteristik tindak tutur meminta dengan formula sebagai berikut. Dalam menuturkan suatu tuturan tertentu, P meminta T melakukan sesuatu jika P mengekspresikan: (a) suatu keinginan agar T melakukan sesuatu, dan (b) maksud bahwa T melakukan sesuatu karena (paling tidak sebagian) keinginan P.

2.7.1.3 Representasi Kekuasaan dalam Larangan

Pada dasarnya direktif dengan larangan (*prohibitives*) juga berisi perintah, tetapi perintah negatif, yaitu agar T tidak melakukan sesuatu. Sebagai salah satu bentuk direktif, larangan mempunyai karakteristik tersendiri. Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa daya kekuasaan larangan cenderung tinggi.

Bach dan Harnish dalam Jumadi (2005: 71) memberikan karakteristik tindak tutur melarang dengan formula sebagai berikut. Dalam menuturkan suatu tuturan tertentu, P melarang T untuk melakukan sesuatu jika P mengekspresikan: (a) keyakinan bahwa tuturannya, dalam hubungan otoritas di atas T, dan (b) maksud bahwa karena tuturan P itu, T tidak melakukan sesuatu.

Tindak tutur dalam larangan cenderung menunjukkan kekuasaan yang dominatif penuturnya. Dominatif penuturnya dimaksudkan bahwa penutur mempunyai legitimasi yang tinggi kepada siapa dan untuk apa larangan itu dilakukan (Jumadi, 2005:75)

2.7.1.4 Representasi Kekuasaan dalam Persilaan

Dalam proses pembelajaran di kelas juga sering terungkap penggunaan persilaan (*premissives*). Sebagai salah satu bentuk direktif, persilaan juga mempunyai karakteristik tertentu. Bach dan Harnish menyebutkan karakteristik bentuk persilaan sebagai berikut. Ketika menuturkan tuturan tertentu, P mempersilakan T untuk melakukan sesuatu jika P mengekspresikan (a) keyakinan bahwa tuturannya, karena otoritasnya terhadap T, membolehkan T untuk melakukan sesuatu, dan (b) maksud bahwa T yakin jika tuturan P membolehkannya untuk melakukan sesuatu.

Penggunaan persilaan dalam pembelajaran di kelas cenderung dalam bentuk tindak tutur direktif yang merepresentasikan kekuasaan paling humanis. Walaupun paling humanis, tetap menunjukkan kekuasaan penuturnya. Hal ini masih dapat dirasakan dominasi hubungan posisi peran P terhadap T (Jumadi. 2005: 79).

2.7.1.5 Representasi Kekuasaan dalam Saran

Saran (*advisories*) merupakan bentuk direktif yang banyak juga digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Dalam tindak tutur di kelas, guru banyak menggunakan saran.

Ditinjau dari maksudnya, berbagai saran digunakan guru dapat dipilah menjadi dua jenis. Pertama, saran yang dimaksudkan agar siswa melakukan sesuatu yang positif, misalnya perlunya menaati peraturan kelas, perlunya memiliki buku dan LKS, perlunya belajar dengan tekun. Kedua, saran yang dimaksudkan agar siswa tidak melakukan hal yang negatif, misalnya saran agar tidak membuat keonaran di kelas; saran agar siswa tidak terlambat masuk kelas; saran agar siswa tidak takut menampilkan gagasannya di kelas; saran agar siswa tidak terlambat dalam mengumpulkan tugas; saran agar tekun belajar.

Saran cenderung merepresentasikan kekuasaan guru. Kekuasaan yang digunakan adalah kekuasaan jabatan dan kekuasaan keahlian. Kekuasaan saran sifatnya tidak berpotensi memaksa, tetapi sekadar memberikan dorongan. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan dalam saran terkait dengan upaya guru mendorong siswa agar melakukan sesuatu atau mencegah tidak melakukan sesuatu.

2.7.1.6 Representasi Kekuasaan dalam Pertanyaan

Pertanyaan tergolong salah satu bentuk direktif. Bach dan Harnish menyatakan ciri pertanyaan sebagai berikut. Ketika menuturkan tuturan tertentu, P menanyai T apakah menjawab pertanyaan atau tidak jika P mengekspresikan: (a) keyakinan bahwa P menanyai T apakah menjawab pertanyaan atau tidak, dan (b) maksud bahwa P menyampaikan kepada T apakah menjawab pertanyaan atau tidak boleh karena keinginan P.

Sebagai salah satu bentuk direktif, pertanyaan juga berpotensi mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi pertanyaan menghendaki T memberikan informasi sebagaimana dimaksudkan oleh tuturan P. Bahkan, hasil kajian ini menunjukkan bahwa pertanyaan, sebagai salah satu bentuk ilokusi tak langsung, dapat mengimplikasikan perintah.

2.7.2 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Asertif

Tindak tutur asertif juga salah satu tindak tutur yang cukup potensial mempresentasikan kekuasaan, baik kekuasaan guru maupun . Gejala ini terkait dengan karakteristik pembelajaran di kelas sebagai domain pendidikan dan pembelajaran. Tindak tutur ini mempunyai fungsi untuk memberi tahu orang-orang mengenai sesuatu. Fungsi tersebut tentu sangat penting dalam pembelajaran di kelas karena proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari proses memberi tahu.

Ciri tindak tutur asertif , yakni (a) tindak tutur asertif merupakan tindak tutur yang mengungkapkan keyakinan P, dan (b) keyakinan itu diungkapkan dalam proposisi yang mempunyai kadar kebenaran tertentu (Jumadi, 2005: 88)

Representasi kekuasaan pada tindak tutur asertif, antara lain menegaskan, menunjukkan, mempertahankan, dan menilai. Representasi pada masing-masing bentuk asertif tersebut mengarah pada terbentuknya sifat kekuasaan tertentu.

2.7.2.1 Representasi Kekuasaan dalam Menegaskan

Penggunaan tindak asertif dengan bentuk menegaskan (*assert*) banyak dijumpai dalam pembelajaran di kelas. Ditinjau dari perspektif etnografi komunikasi dari Hymes penggunaan tindak tutur menegaskan terkait dengan berbagai tujuan, misalnya untuk menghilangkan keragu-raguan, memberikan penekanan, memberikan klarifikasi, atau yang lain.

Sebagai salah satu bentuk asertif, menegaskan juga berpotensi mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi pernyataan P menghendaki T yakin dan tidak ragu dengan apa yang dimaksudkan oleh tuturan P. Kekuasaan yang terbangun ketika menegaskan adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian dalam tuturannya akan menghilangkan keragu-raguan T, memberikan penekanan, atau memberikan klarifikasi tentang suatu hal.

2.7.2.2 Representasi kekuasaan dalam Menunjukkan

Tindak asertif dengan bentuk menunjukkan (*suggest*) banyak digunakan dalam pembelajaran. Daya ilokusi bentuk ini membuat T memahami atau mengetahui sesuatu sebagaimana ditunjukkan oleh tuturan P.

Sebagai salah satu bentuk asertif, menunjukkan juga berpotensi mempresentasikan kekuasaan. Daya ilokusi pernyataan P menghendaki T paham atau jelas dengan apa yang dimaksudkan oleh tuturan P. Kekuasaan yang terbangun ketika

menunjukkan adalah kekuasaan keahlian. Kekuasaan keahlian dalam konteks tuturannya, T akan memahami atau mengetahui sesuatu sebagaimana ditunjukkan oleh tuturan P.

2.7.2.3 Representasi Kekuasaan dalam Mempertahankan

Tindak asertif dengan bentuk mempertahankan (*maintain*) juga banyak digunakan dalam pembelajaran kelas. Bentuk mempertahankan lebih sering digunakan dalam kelas-kelas yang menerapkan teknik pembelajaran yang mendorong siswa secara aktif terlibat di dalam proses pembelajaran. Dalam proses diskusi, tanya jawab, atau sejenisnya bentuk mempertahankan sering digunakan.

Bagi guru, tindak mempertahankan ini sering dilakukan ketika siswa mencoba mempertanyakan kebijakan atau pun materi pembelajaran yang diberikan. Bentuk mempertahankan yang dilakukan guru biasanya bukan dimaksudkan untuk dominasi, tetapi justru untuk menghindari terjadinya kesalahan pemahaman atau kesalahan konsep pada diri siswa.

Sebagai salah satu bentuk asertif, mempertahankan juga mempunyai karakteristik tertentu. Tindak tutur asertif dengan bentuk mempertahankan biasanya diwujudkan dalam tuturan yang berisi proposisi yang diekspresikan P untuk meyakinkan Terhadap kebenaran gagasan yang disampaikan. Penggunaan bentuk mempertahankan cenderung merepresentasikan kekuasaan yang bersifat dominatif. Melalui tindak tutur mempertahankan, biasanya guru berusaha mempertahankan pendapatnya dari kritik, saran, atau pun celaan.

2.7.2.4 Representasi Kekuasaan dalam Menilai

Tindak asertif dengan bentuk menilai (*appraise*) juga cukup menonjol penggunaannya dalam pembelajaran kelas. Bentuk menilai biasanya diwujudkan dengan proposisi tertentu yang berisi argumen-argumen untuk menguatkan bentuk penilaiannya.

Bach dan Harnish dalam Jumadi (2005: 99) memberi karakteristik menilai sebagai berikut. Ketika menuturkan suatu tuturan tertentu, P menilai apabila P mengekspresikan (a) keyakinan tentang suatu hal yang didasarkan pada prosedur pencarian kebenaran, dan (b) maksud bahwa T percaya tentang hal tersebut sebab P memiliki dukungan tentang hal itu.

Dalam konteks pembelajaran di kelas, bentuk menilai ini bisa digunakan oleh guru atau pun siswa. Akan tetapi, yang sering ditemukan tindakan guru menilai siswa atau siswa menilai siswa lain, jarang ditemukan siswa menilai guru, kecuali dimintai pendapat oleh guru. Aspek yang dinilai menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap.

Penggunaan tindak menilai biasanya didasari oleh ukuran-ukuran tertentu. Terkait dengan tindak asertif, mengarah pada benar tidak benar, baik tidak baik, layak tidak layak, dan sejenisnya yang didasarkan pada ukuran-ukuran pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, tindak asertif dengan bentuk menilai juga merepresentasikan kekuasaan kepakaran. Di samping kepakaran, tindak tutur dalam menilai bisa juga merepresentasikan kekuasaan penghargaan. Kekuasaan penghargaan dimunculkan ketika P memuji T. T merasa bangga dan terpengaruh dengan yang dituturkan P, itu menunjukkan representasi kekuasaan penghargaan.

2.7.3 Representasi Kekuasaan dalam Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif ternyata juga merepresentasikan kekuasaan guru. Tindak tutur ekspresif merupakan bentuk tindak tutur yang menyatakan apa yang dirasakan oleh P. Dengan tindak tutur ini, P mengekspresikan keadaan-keadaan psikologis tentang pertanyaan-pertanyaan rasa senang, rasa tidak senang, perasaan pedih, perasaan luka, perasaan gembira, perasaan duka, ucapan terima kasih, ucapan selamat.

2.7.3.1 Representasi Kekuasaan dalam Pernyataan Rasa Senang

Bentuk-bentuk pernyataan rasa senang banyak digunakan dalam tindak tutur pembelajaran di kelas, baik oleh guru maupun siswa. Guru merupakan peserta tutur yang lebih banyak menggunakan tindak tutur ekspresif ini. Bentuk pernyataan rasa senang biasanya merupakan respon terhadap tindakan T yang menurut ukuran pendidikan dan pengajaran bernilai positif. Penggunaan bentuk pernyataan rasa senang tersebut cenderung mempresentasikan kekuasaan penghargaan.

Penggunaan tindak ekspresif dalam pernyataan rasa senang merepresentasikan kekuasaan guru. Jenis tindak tutur ini cenderung digunakan untuk merespon sikap atau perilaku siswa yang positif dan memacu siswa untuk ikut terlibat dalam pembelajaran.

2.7.3.2 Representasi Kekuasaan dalam Pernyataan Rasa Tidak Senang

Di samping ekspresi rasa senang, ekspresi rasa tidak senang pun sering digunakan dalam tindak tutur di kelas. Pada umumnya, penggunaan tindak tutur ini karena berdasarkan persepsi P, T tidak menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang baik menurut ukuran pendidikan dan pengajaran. Tindak tutur ekspresif dalam pernyataan rasa senang biasanya merepresentasikan kekuasaan paksaan. (Jumadi, 2005: 58 – 108).

Kekuasaan paksaan yang digunakan P bisa dalam bentuk hukuman atau bisa juga untuk menghentikan perilaku negatif atau perilaku yang kurang baik dilihat dari ukuran pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, kekuasaan yang direpresentasikan melalui tindak tutur ini cenderung dominatif.

2.8 Pembelajaran di SMP

SMP (Sekolah Menengah Pertama) merupakan salah satu sekolah yang ada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional RI. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, struktur kurikulum SMP/MTs meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai Kelas VII sampai dengan Kelas IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Kurikulum SMP/MTs memuat 10 mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri seperti tertera pada Tabel 1.
- b. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum empat jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan.

- c. Alokasi waktu satu jam pembelajaran adalah 40 menit.

Tabel 2.1 Struktur Kurikulum SMP/MTs

Komponen	Kelas dan Alokasi Waktu		
	VII	VIII	IX
A. Mata Pelajaran			
1. Pendidikan Agama	2	2	2
2. Pendidikan Kewarganegaraan	2	2	2
3. Bahasa Indonesia	4	4	4
4. Bahasa Inggris	4	4	4
5. Matematika	4	4	4
6. Ilmu Pengetahuan Alam	4	4	4
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	4	4	4
8. Seni Budaya	2	2	2
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	2	2
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	2	2
B. Muatan Lokal	2	2	2
C. Pengembangan Diri	2*)	2*)	2*)
Jumlah	32	32	32

2*) Ekuivalen 2 jam pembelajaran

Berdasarkan struktur muatan kurikulum di atas, pembelajaran bahasa Indonesia di SMP dalam satu minggu adalah empat jam pelajaran, satu jam pelajaran alokasi waktunya adalah 40 menit, artinya jika dibagi menjadi 2 x pertemuan maka setiap pertemuan adalah $2 \times 40 \text{ menit} = 90 \text{ menit}$.

2.9 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP

Konsep pembelajaran terkait erat dengan proses belajar mengajar. Belajar dilakukan oleh peserta didik atau siswa sedangkan mengajar dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. Iskandarwassid dan Sunendar (2011: 1), belajar adalah

suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku berpikir, bersikap, maupun berbuat sedangkan mengajar diartikan sebagai usaha menciptakan sistem lingkungan yang terdiri atas komponen pengajar, tujuan pengajaran, peserta didik, materi pelajaran, metode pengajaran, media pengajaran, dan faktor administrasi serta biaya yang memungkinkan terjadinya proses belajar secara optimal.

Belajar mengajar artinya sebuah proses yang dilakukan oleh guru dan siswa yang di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi dua arah antara guru dan siswa atau sebaliknya.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebuah proses belajar mengajar yang optimal, di dalamnya terjadi interaksi dan komunikasi dua arah yang ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku, baik tingkah laku berpikir, bersikap atau pun berbuat.

Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang penting di sekolah. Pembelajaran bahasa pada hakikatnya adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam hal berkomunikasi. Pendekatan yang

cukup populer dalam pengajaran bahasa adalah pendekatan komunikatif (Iskandarwassid, 2011: 55)

Adapun ciri-ciri pembelajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut:

- a. acuan berpijaknya adalah kebutuhan peserta didik dan fungsi bahasa;
- b. tujuan belajar bahasa adalah membimbing peserta didik agar mampu berkomunikasi dalam situasi sebenarnya;
- c. silabus pengajaran harus ditata sesuai dengan fungsi pemakaian bahasa;
- d. peranan tata bahasa dalam pengajaran bahasa tetap diakui;
- e. tujuan utama adalah komunikasi yang bertujuan;
- f. peran pengajar sebagai pengelola kelas dan pembimbing peserta didik dalam berkomunikasi diperluas.

Berkenaan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan Pasal 7 menempatkan pembelajaran bahasa Indonesia SMP/MTs tersebar ke dalam kelompok mata pelajaran berikut.

1. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.
2. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan

melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

3. Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan.

Dari pengelompokan tersebut, hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa menunjang keberhasilan dalam mempelajari bidang studi lainnya. Pembelajaran bahasa mencakup tiga kelompok mata pelajaran yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan SMP/MTs/SMPLB*/Paket B adalah sebagai berikut:

1. berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun;
2. menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana;
3. menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia sederhana.

Perangkat tujuan pembelajaran bahasa Indonesia tersebut dijabarkan lebih rinci dalam standar kompetensi mata pelajaran. Dalam standar kompetensi mata pelajaran memuat kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik. Kemampuan minimal dirinci ke dalam empat komponen kemampuan berbahasa dan sastra berikut.

1. Mendengarkan

Memahami pembelajaran lisan dalam kegiatan wawancara, pelaporan, penyampaian berita radio/TV, dialog interaktif, pidato, khotbah/ceramah, dan pembacaan berbagai karya sastra berbentuk dongeng, puisi, drama, novel remaja, syair, kutipan, dan sinopsis novel.

2. Berbicara

Menggunakan pembelajaran lisan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, informasi, pengalaman, pendapat, dan komentar dalam kegiatan wawancara, presentasi laporan, diskusi, protokoler, dan pidato, serta dalam berbagai karya sastra berbentuk cerita pendek, novel remaja, puisi, dan drama.

3. Membaca

Menggunakan berbagai jenis membaca untuk memahami berbagai bentuk pembelajaran tulis, dan berbagai karya sastra berbentuk puisi, cerita pendek, drama, novel remaja, antologi puisi, novel dari berbagai angkatan.

4. Menulis

Melakukan berbagai kegiatan menulis untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi dalam bentuk buku harian, surat pribadi, pesan singkat, laporan, surat dinas, petunjuk, rangkuman, teks berita, slogan, poster, iklan baris, resensi, karangan, karya ilmiah sederhana, pidato, surat pembaca, dan berbagai karya sastra berbentuk pantun, dongeng, puisi, drama, puisi, dan cerpen.

Mencermati paparan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia dan standar kompetensi lulusan mata pelajaran, pembelajaran bahasa Indonesia mencakup kebahasaan dan kesastraan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia di SMP bertujuan untuk menguasai empat komponen kemampuan berbahasa (mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis), baik bidang kebahasaan maupun kesastraan. Jadi, tujuan tersebut diaplikasikan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar (secara lisan dan tertulis) dan dapat mengapresiasi hasil karya sastra di Indonesia.